

---

## ANCAMAN RADIKALISME DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI KABUPATEN JEMBER

Binaridha Kusuma Ningtyas<sup>1</sup>, Sulistyono<sup>2</sup>, Fauziyah<sup>3</sup>

email: [binaridha@unmuhjember.ac.id](mailto:binaridha@unmuhjember.ac.id)

Program Studi Ilmu Pemerintahan<sup>1</sup>, Program Studi Ilmu Hukum<sup>2,3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

---

### *Abstract*

*This article aims to identify challenges in the protection policy for Indonesian migrant workers from Jember Regency with a focus on the threat of radicalization in the digital era. The development of information technology and global migration affects various aspects of migrant workers lives, not only in the economic aspect, but also has the potential to open up opportunities for radicalism. This research uses descriptive qualitative methods, with data collection through interviews and study of related documents. The research results show that disinformation circulating on social media, as well as Indonesian migrant workers social isolation abroad, are factors that exacerbate vulnerability to radicalism. Social media is the main channel for job information, but it often carries the risk of fraud and recruitment by illegal agents. Apart from that, the extremism-based violence faced by Indonesian migrant workers also appears as a threat that has not received much attention. This research suggests the need to strengthen Indonesian migrant workers protection policies, especially in utilizing technology and increasing digital literacy to prevent radicalization among Indonesian migrant workers.*

**Keywords:** *Indonesian Migrant Workers, Protection, Radicalism*

### **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tengah bergelut dengan isu perlindungan pekerja migran. Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 merupakan warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan mendapat upah di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan data hingga April 2024, terdapat 29.803 penempatan yang masih didominasi oleh sektor formal yaitu sebesar 51,86% dan sektor informal 48,14%. Data nasional menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan mendominasi jumlah pekerja migran yaitu sebesar 20.812 (69,83%) dan laki-laki berjumlah 8.991 (30,17%). Negara penempatan terkonsentrasi di Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Korea

Selatan, dan Jepang, dengan jenis pekerjaan terbanyak sebagai pembantu rumah tangga, perawat, operator produksi, buruh perkebunan, dan buruh. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang paling banyak menyumbang TKI dengan jumlah 8.267 orang (BP2MI, 2024). Bekerja sebagai PMI di luar negeri menjadi pilihan banyak orang, salah satunya dipengaruhi oleh besarnya upah dan kondisi kehidupan yang lebih baik di lokasi penempatan (Muslihatinningsih et al., 2020).

Terdapat korelasi yang tinggi antara pekerja migran dengan penyebaran paham radikalisme dan terorisme. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku, yang pada akhirnya berpotensi mencapai titik ekstrem radikalisme, yaitu tindakan-tindakan agresif yang terintegrasi

dalam kelompok tertentu (Goga, 2019). Penyebaran paham radikalisme dan terorisme dalam praktik pekerja migran merupakan masalah serius karena dapat menjadi sumber ancaman nasional. Tantangan yang dihadapi PMI di era digital sangat beragam dan memerlukan pemahaman yang komprehensif (Anandhita & Ariansyah, 2018; Madu, 2018; Onitsuka et al., 2018). Radikalisasi merupakan proses ketika seseorang menjadi semakin termotivasi untuk menggunakan cara-cara kekerasan terhadap anggota kelompok luar atau target simbolik untuk mencapai perubahan perilaku dan tujuan politik. Proses radikalisasi terdiri dari tiga fase, yaitu (1) kepekaan terhadap ideologi radikal, (2) menjadi anggota kelompok radikal, dan (3) siap bertindak atas nama ideologi kelompok (Doosje et al., 2016).

Radikalisme, dalam konteks pekerja migran, merujuk pada penganut pandangan politik atau sosial yang ekstrem atau revolusioner yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja migran. Pekerja migran sering kali rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan, menjadikan mereka target potensial bagi ideologi radikal yang mengeksploitasi situasi mereka yang tidak menentu (Helbling & Meierrieks, 2022; Ragazzi, 2017). Era digital telah membawa tantangan baru bagi PMI terkait dengan ancaman radikalisme (Mansour-Ille, 2019; Prabaningrum Kusumawati & Khairun Hamrany, 2023). Era digital telah merevolusi cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, dan terlibat dengan orang lain (Mell, 2019). Dengan munculnya platform media sosial dan aplikasi layanan pengiriman pesan, penyebaran ideologi radikal menjadi lebih mudah dan lebih luas. Kelompok radikal memanfaatkan ruang digital untuk merekrut dan mendoktrinasi individu, termasuk

pekerja migran (Institute for Policy Analysis of Conflict, 2015).

Penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi PMI dalam menghadapi ancaman radikalisme di era digital, khususnya dalam konteks lokal di Kabupaten Jember. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam tata kelola kebijakan perlindungan yang efektif bagi PMI. Dengan memahami faktor-faktor yang membuat PMI rentan terhadap radikalisasi di era digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kebijakan perlindungan, memastikan migrasi yang aman, dan melindungi keamanan nasional dari ancaman terorisme yang melibatkan PMI di tingkat lokal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi PMI dalam menghadapi ancaman radikalisme di era digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif pengalaman individu. Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten penyumbang PMI terbesar di Jawa Timur, sehingga Jember menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji permasalahan radikalisasi di kalangan pekerja migran. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara melibatkan tujuh narasumber yaitu lima purna pekerja migran, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, dan Koordinator NGO Migrant CARE Jember. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur lain, seperti data jumlah pekerja migran yang

diperoleh dari situs resmi pemerintah dan artikel penelitian relevan lainnya. Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan konteks yang lebih komprehensif terhadap temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Disinformasi Melalui Media Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa PMI di Kabupaten Jember cenderung lebih banyak mendapatkan informasi pekerjaan dari saudara dan media sosial daripada informasi resmi pemerintah daerah. Ketergantungan pekerja migran pada informasi dari saudara dan media sosial menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi resmi yang terverifikasi. Fenomena tersebut mengungkap beberapa aspek penting tentang bagaimana pekerjaan didistribusikan dan diakses oleh pekerja migran. Salah satu purna PMI menyampaikan mendapatkan informasi pekerjaan dari media sosial, yaitu:

"Saya awalnya mendapatkan informasi pekerjaan dari TikTok. Dibilang kalau pekerjaannya nanti sebagai asisten rumah tangga di rumah dokter gigi di Malaysia. Tapi begitu sampai di Malaysia, pekerjaannya berbeda, bukan juga di rumah dokter gigi, tapi jadi pembantu sama perawat lansia"

Narasumber tersebut juga menyatakan bahwa proses rekrutmen berlangsung dengan cepat, yaitu kurang dari satu bulan. Selain TikTok, beberapa purna pekerja migran yang ditemui juga menyatakan bahwa banyak informasi pekerjaan atau rekrutmen melalui Facebook dan Instagram.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi saluran utama untuk mendistribusikan

informasi terkait kesempatan kerja di luar negeri. Dalam kasus ini, media sosial menawarkan akses yang cepat dan mudah, namun sering kali mengesampingkan aspek ketepatan informasi. Hal tersebut mencerminkan pergeseran dalam pola komunikasi rekrutmen, dari metode tradisional seperti agen penyalur ke metode yang lebih informal dan digital.

Rekrutmen calon pekerja migran di media sosial jika tidak bersumber dari informasi resmi, dapat diindikasikan sebagai bentuk non prosedural, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kabupaten Jember:

"Salah satu indikasi rekrutmen non prosedural adalah menawarkan proses yang cepat. Padahal, untuk bisa bekerja di luar negeri, CPMI harus melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Mereka juga wajib mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat sebagai syarat keberangkatan. Dalam rekrutmen non prosedural, agen atau yang merekrut seringkali mengabaikan persyaratan administratif dan legal hanya demi mempercepat proses keberangkatan. Iming-iming proses yang cepat itu, yang menarik pekerja migran kita, sehingga terjebak dalam proses yang non prosedural"

Proses yang cepat tersebut merupakan daya tarik utama bagi calon PMI yang terdesak membutuhkan pekerjaan, namun hal tersebut justru menempatkan pekerja migran dalam posisi rentan terhadap eksploitasi, penipuan, atau bahkan perdagangan manusia. NGO Migrant CARE juga menyampaikan bahwa media sosial kerap kali digunakan oleh agen perekrutan ilegal untuk menghubungi para calon pekerja migran, sebagaimana berikut:

"Sekarang ini, rekrutmen non prosedural tidak lagi hanya menasar kelompok dengan pendidikan rendah, tapi juga anak muda yang berpendidikan tinggi. Mereka sering menjadi korban penipuan karena tidak menyaring informasi di media sosial. Banyak dari mereka percaya pada tawaran kerja yang terlihat menarik dan cepat tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Media sosial seperti TikTok sering menjadi pintu masuk bagi agen-agen ilegal untuk menjebak calon pekerja migran kita."

Di Kabupaten Jember, pekerja migran umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini mengindikasikan keterbatasan akses mereka terhadap edukasi literasi digital dan informasi yang sah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, menjadikan para calon pekerja migran cenderung tidak memiliki keterampilan kritis untuk memverifikasi keabsahan informasi yang diterima. Sebagai akibatnya, kelompok ini menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk disinformasi yang mengarah pada penipuan dalam proses rekrutmen. Dalam penelitian ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi informasi tetapi juga sebagai mekanisme yang secara tidak langsung meningkatkan risiko disinformasi. Hal ini menuntut adanya intervensi dari pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang lebih aman bagi distribusi informasi ketenagakerjaan khususnya bagi calon pekerja migran. Selain itu, penelitian ini juga menemukan fenomena rekrutmen non prosedural yang kini tidak hanya menasar individu dengan pendidikan rendah, tetapi juga anak muda yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola rekrutmen pekerja migran. Salah

satu faktor utama yang berperan dalam pergeseran ini adalah minimnya literasi digital di kalangan anak muda. Anak muda berpendidikan tinggi umumnya diasumsikan memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan memverifikasi kebenaran sumber informasi. Minimnya literasi digital ini membuat anak muda rentan terhadap informasi yang menyesatkan atau tidak sah yang beredar di platform digital, seperti iklan pekerjaan yang menjanjikan gaji tinggi dengan proses cepat dan mudah.

Tawaran pekerjaan yang disampaikan sering kali tampak menarik, namun tidak disertai dengan informasi yang cukup mengenai legalitas dan prosedur rekrutmen yang benar. Calon pekerja migran tertarik pada tawaran pekerjaan yang cepat dan tidak memerlukan proses yang rumit, tanpa menyadari potensi risiko yang terkandung dalam proses tersebut.

Minimnya literasi digital juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman mengenai cara untuk memeriksa legalitas agen rekrutmen atau perusahaan yang menawarkan pekerjaan. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang prosedur rekrutmen formal, banyak anak muda yang merasa bahwa proses rekrutmen yang cepat dan tanpa hambatan administratif adalah keuntungan.

Selain itu, kurangnya kesadaran terhadap legalitas rekrutmen pekerja migran juga disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai regulasi ketenagakerjaan yang ada. Anak muda berpendidikan tinggi sering kali lebih fokus pada peluang ekonomi yang ditawarkan, dan kurang memeriksa latar belakang agen atau prosedur yang seharusnya dilalui untuk memastikan keberangkatan yang sah dan aman. Dalam hal ini, meskipun mereka memiliki pendidikan formal, kekurangan pemahaman mengenai literasi digital dan regulasi

ketenagakerjaan tetap membuat anak muda rentan terhadap risiko rekrutmen non prosedural.

Dengan demikian, pergeseran target rekrutmen ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi literasi digital yang lebih komprehensif, tidak hanya bagi kelompok dengan pendidikan rendah, tetapi juga untuk anak muda berpendidikan tinggi. Edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang bagaimana cara menyaring informasi di media sosial, mengenali agen atau perusahaan rekrutmen yang sah, serta memahami prosedur legal dalam rekrutmen pekerja migran untuk melindungi pekerja migran dari potensi penipuan dan eksploitasi.

## **2. Kerentanan PMI dan Kekerasan Berbasis Ekstrimisme**

Kerentanan PMI sering dipahami secara terbatas pada aspek ekonomi dan fisik. Kerentanan tersebut biasanya dikaitkan dengan eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, pelecehan, hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMI juga menghadapi ancaman lain yang belum banyak mendapat perhatian, yaitu kerentanan terhadap radikalisme. Kerentanan terhadap radikalisme ini muncul sebagai akibat dari kombinasi berbagai faktor. Dalam konteks migrasi, kondisi tersebut sering diperburuk oleh isolasi sosial, tekanan ekonomi, dan minimnya dukungan komunitas di negara tujuan. Situasi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal untuk memengaruhi atau merekrut PMI.

Bagi PMI yang bekerja di luar negeri, isolasi sosial sering kali menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi. Hidup jauh dari keluarga, teman, dan komunitas asal sering kali membuat mereka merasa

terasing, terutama jika mereka bekerja di lingkungan yang tidak memberikan ruang untuk berinteraksi secara bebas. Isolasi ini bisa diperburuk oleh faktor budaya, bahasa, atau bahkan aturan ketat dari pemberi kerja yang membatasi mobilitas mereka. Berdasarkan hasil wawancara kepada purna PMI, beberapa narasumber menyampaikan bahwa selama bekerja di luar negeri, para purna PMI memiliki kebebasan untuk beribadah, namun untuk memiliki keterbatasan pada aktivitas sosial. Keterbatasan pada aktivitas atau mobilitas sosial tersebut memberikan rasa keterasingan pada pekerja migran. Ketidakmampuan untuk berkumpul, berorganisasi, atau berpartisipasi dalam komunitas sosial menyebabkan kebutuhan spiritual dan emosional mereka tidak tersalurkan secara optimal.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut, banyak PMI beralih ke media digital, seperti mengikuti kajian keagamaan berbasis daring. Kajian keagamaan daring menjadi solusi praktis bagi PMI untuk tetap merasa terhubung dengan komunitas yang memiliki kesamaan nilai spiritual. Namun, penggunaan media digital juga memiliki risiko tertentu. Sifat kajian keagamaan daring yang tidak selalu terpantau memungkinkan masuknya konten atau ajaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moderasi, yang dapat membuka ruang bagi penyebaran ideologi radikal.

Menurut NGO Migrant CARE Jember, fenomena kekerasan berbasis ekstrimisme yang dialami oleh pekerja migran Indonesia bukanlah hal baru, tetapi telah menjadi resiko yang melekat dalam proses migrasi. Menurut NGO Migrant CARE Jember, PMI sering kali berada di posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pengaruh ideologis ekstrem selama berada di luar negeri. Ancaman

tersebut muncul dari beberapa faktor yang saling terkait, seperti isolasi sosial, keterbatasan akses terhadap komunitas, dan paparan terhadap lingkungan yang memiliki kecenderungan ekstremisme. Fenomena kekerasan berbasis ekstremisme dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga manipulasi ideologis. Proses tersebut tidak hanya terjadi di tempat kerja tetapi juga melalui media sosial, termasuk forum keagamaan daring yang tidak bisa diawasi secara ketat.

Kerentanan PMI terhadap ekstremisme juga diperparah oleh kemudahan kelompok radikal memanfaatkan forum keagamaan daring. Namun, kurangnya pengawasan membuat forum daring tersebut menjadi medium penyebaran ideologi ekstremis. Kelompok radikal menggunakan pendekatan bertahap, mulai dari diskusi agama yang terlihat moderat hingga pengenalan nilai-nilai ekstrem. Proses tersebut memanipulasi kebutuhan spiritual dan emosional pekerja migran.

Berdasarkan laporan The Soufan Group, (2015) dan The Financial Action Task Force (2018) kelompok radikal tidak hanya merekrut individu untuk terlibat langsung dalam aktivitas teror, tetapi juga merekrut dan memanfaatkan individu sebagai sumber pendanaan aktivitas radikalisme dan terorisme. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa remitansi menjadi salah satu sumber pendanaan yang diperoleh melalui simpatisan yang berasal di luar negeri. Meskipun dalam penelitian ini belum ditemukan bukti empiris yang menunjukkan adanya pengiriman remitansi dari PMI kepada organisasi yang terafiliasi dengan terorisme, menurut NGO Migrant CARE Jember, praktik tersebut seharusnya menjadi perhatian serius terutama bagi pemerintah daerah. Beberapa indikasi menunjukkan

bahwa calon pekerja migran kita menjadi sasaran rekrutmen secara online dengan tujuan ke negara-negara yang terindikasi memiliki afiliasi dengan jaringan terorisme internasional.

### **3. Tantangan Dalam Tata Kelola Kebijakan Perlindungan PMI di Kabupaten Jember**

Proses perlindungan PMI terdiri dari tiga tahap, yaitu pra penempatan, penempatan, dan pasca penempatan. Pada masing-masing tahapan tersebut membutuhkan strategi dan kebijakan yang saling terintegrasi dengan berbagai pihak. Pada tahap pra penempatan, kebijakan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan bahwa PMI yang akan diberangkatkan memiliki kesiapan yang memadai, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan terkait hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Di Kabupaten Jember, peran pemerintah daerah sangat penting dalam memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai negara tujuan, kondisi kerja, serta hak-hak yang dimiliki oleh pekerja migran.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan proses migrasi yang aman bagi calon pekerja migran, salah satunya adalah melalui sosialisasi sampai ke level desa dan program “Nol Rupiah Menjadi PMI”. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri dengan mengikuti jalur resmi. Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember kegiatan sosialisasi menjadi sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada calon pekerja migran tentang prosedur dan informasi tentang hak-hak pekerja migran, dengan demikian diharapkan dapat mengurangi resiko menjadi korban migrasi

non prosedural. Selain sosialisasi, juga terdapat program “Nol Rupiah Menjadi PMI” yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi PMI tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti jalur migrasi legal serta mengurangi hambatan finansial yang sering kali mendorong masyarakat memilih jalur non prosedural.

Berdasarkan temuan penelitian, pada tahap pra penempatan terdapat permasalahan terkait minimnya peran pemerintah desa. Dalam proses migrasi, calon pekerja migran membutuhkan surat rekomendasi dari desa. Namun dalam memberikan surat rekomendasi, pemerintah desa tidak dapat melakukan verifikasi mendalam, sehingga tidak bisa mengidentifikasi apakah masyarakatnya mengikuti rekrutmen legal atau non prosedural. Minimnya peran pemerintah desa dalam tata kelola kebijakan migrasi di Kabupaten Jember menunjukkan kurang optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pemerintah desa tidak memiliki pengetahuan teknis terkait proses migrasi yang aman. Akibatnya, resiko migrasi non prosedural tetap tinggi karena tidak ada pengawasan yang efektif di tingkat desa, sehingga membuka peluang eksploitasi. Pemerintah desa juga kehilangan perannya sebagai pengawas migrasi tenaga kerja, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program-program perlindungan yang dicanangkan pemerintah daerah. Selain itu, untuk meningkatkan peran desa, maka pemerintah daerah perlu dengan menyediakan panduan teknis di lapangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan administrasi secara formalitas, tetapi juga berperan aktif dalam pengawasan dan perlindungan calon PMI.

Pada tahap penempatan, sejumlah kebijakan dan program telah diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagai bagian dari upaya perlindungan PMI. Salah satunya adalah fasilitasi pemulangan PMI dan pemberian bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah di negara penempatan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi PMI dari berbagai risiko selama berada di negara tujuan. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi kendala signifikan, terutama dalam aspek pembiayaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember menyatakan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pemulangan PMI sangat besar, sehingga membatasi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program perlindungan secara optimal, khususnya pada tahap pra penempatan dan pasca penempatan.

Tahap pasca penempatan, yang seharusnya menjadi momen penting untuk mendukung reintegrasi sosial PMI ke dalam masyarakat, belum mendapatkan perhatian yang memadai. Proses ini krusial karena PMI yang kembali ke daerah asal sering kali membawa berbagai permasalahan, seperti kondisi fisik yang memburuk akibat kerja keras atau kecelakaan, permasalahan ekonomi di kampung halaman, serta masalah stigma dan diskriminasi yang diterima setelah bekerja di luar negeri. Menurut NGO Migrant CARE Jember, banyak PMI yang pulang dalam kondisi sakit atau cacat, yang pada gilirannya mempersulit mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal. Di sisi lain, kebutuhan ekonomi tetap menjadi tekanan utama, mengingat sebagian besar PMI merupakan tulang punggung keluarga. Selain itu, purna PMI juga menghadapi stigma sosial sebagai pekerja migran dengan persepsi negatif, seperti dianggap rendah atau tidak sesuai dengan norma lokal. Hal

tersebut menghambat proses reintegrasi ke dalam komunitas asal, sehingga menambah beban psikologis dan sosial yang pernah PMI alami.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam tata kelola perlindungan PMI adalah ketidakmampuan untuk mendata secara akurat jumlah PMI asal Kabupaten Jember yang bekerja di luar negeri. Dalam praktiknya, PMI biasanya memiliki kontrak kerja selama dua tahun di negara penempatan, namun, ketika kontrak tersebut diperbarui, pemerintah daerah kesulitan mengidentifikasi apakah PMI tersebut tetap berada di negara penempatan awal, melanjutkan pekerjaan di tempat kerja sebelumnya, berpindah ke majikan baru, atau bahkan pindah ke negara lain.

Kondisi tersebut semakin memperumit upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada PMI selama mereka bekerja di luar negeri. PMI yang bekerja di luar negeri langsung berhubungan dengan agen di negara penempatan. Pemerintah daerah tidak memiliki sistem atau mekanisme yang memadai untuk memantau dan memberikan perlindungan secara langsung kepada PMI selama mereka bekerja di luar negeri. Pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi atau melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap kondisi PMI yang bekerja di luar negeri. Tantangan tersebut mengharuskan pemerintah untuk terus mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dalam memantau serta mendukung keberadaan dan kesejahteraan PMI.

Perlindungan yang lebih efektif memerlukan pendekatan yang terencana dengan baik, termasuk penguatan sinergi

antar lembaga terkait, sampai ke level desa. Salah satu langkah penting dalam hal ini adalah memperkuat koordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang berperan sebagai mitra utama dalam proses penempatan PMI ke luar negeri. Pendataan PMI yang belum maksimal memiliki implikasi serius terhadap efektivitas perlindungan pekerja migran. Hambatan tersebut juga memperbesar risiko PMI terpapar paham radikalisme.

## **PENUTUP**

Penelitian ini mengungkapkan sejumlah isu penting terkait dengan perlindungan PMI asal Kabupaten Jember.

*Pertama*, disinformasi melalui media sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam proses rekrutmen PMI di Kabupaten Jember, di mana media sosial seperti Tiktok, Facebook, dan Instagram menjadi saluran utama informasi bagi masyarakat dalam mencari informasi pekerjaan di luar negeri. Ketergantungan terhadap media sosial mencerminkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi dari pemerintah daerah. Meskipun media sosial memberikan akses cepat dan mudah, namun media sosial dapat memperburuk terhadap informasi pekerjaan yang menyesatkan dan berpotensi pada resiko proses rekrutmen non prosedural. Kurangnya literasi digital di kalangan sebagian besar calon PMI, yang sebagian besar berasal dari desa dengan tingkat pendidikan rendah, menjadikan calon PMI kelompok yang rentan terhadap penipuan dan eksploitasi.

*Kedua*, kerentanan PMI terhadap radikalisasi menjadi isu yang semakin mendesak, di mana isolasi sosial, keterbatasan aktivitas sosial, serta akses terbatas terhadap komunitas mengarah pada potensi terpaparnya ideologi ekstrem. Kajian keagamaan daring yang diikuti oleh PMI di



luar negeri, dapat berpotensi menjadi saluran bagi penyebaran ajaran radikal. Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana kelompok radikal memanfaatkan kondisi isolasi tersebut untuk merekrut dan memanipulasi PMI.

*Ketiga*, tantangan dalam tata kelola kebijakan perlindungan PMI di Kabupaten Jember mencakup beberapa aspek. Selain masalah koordinasi antara berbagai sektor khususnya pemerintah daerah, pemerintah desa, dan P3MI, juga terdapat masalah terkait keterbatasan anggaran dan alokasi sumber daya yang tidak mencukupi untuk mendukung program perlindungan PMI secara efektif. Pemerintah daerah sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh data yang akurat dan terkini mengenai jumlah PMI yang sedang bekerja di luar negeri maupun yang telah kembali, sehingga menyulitkan penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah radikalisasi, disinformasi melalui media sosial, serta tantangan dalam tata kelola kebijakan perlindungan PMI di Kabupaten Jember saling terkait dan memperburuk kondisi perlindungan terhadap PMI. Kerentanan PMI terhadap ideologi ekstrem semakin meningkat seiring dengan terbatasnya akses informasi yang benar, baik dalam proses rekrutmen maupun selama mereka bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman radikalisasi, diperlukan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait, penguatan literasi digital di kalangan calon PMI, serta pemanfaatan teknologi yang lebih efektif untuk mendukung tata kelola kebijakan perlindungan PMI yang lebih holistik.

## REFERENSI

- Anandhita, V. H., & Ariansyah, K. (2018). Gender Inequality on the Internet Access and Use in Indonesia: Evidence and Implications. *2018 International Conference on ICT for Rural Development (IC-ICTRuDev)*, 142–147.
- BP2MI. (2024). *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Januari-April 2024*. [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data\\_03-05-2024\\_Laporan\\_Publikasi\\_Data\\_PMI\\_Januari\\_s.d.\\_April\\_2024.pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_03-05-2024_Laporan_Publikasi_Data_PMI_Januari_s.d._April_2024.pdf)
- Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., de Wolf, A., Mann, L., & Feddes, A. R. (2016). Terrorism, radicalization and de-radicalization. In *Current Opinion in Psychology* (Vol. 11, pp. 79–84). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.06.008>
- Goga, C. I. (2019). Is migration a risk factor for radicalization? Social and legal instruments for identifying and combating radicalization. In *Sociology and Social Work Review* (Vol. 1).
- Helbling, M., & Meierrieks, D. (2022). Terrorism and Migration: An Overview. In *British Journal of Political Science* (Vol. 52, Issue 2, pp. 977–996). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/S0007123420000587>
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2015). *ONLINE ACTIVISM AND SOCIAL MEDIA USAGE AMONG INDONESIAN EXTREMISTS*.
- Madu, L. (2018). Indonesia's Digital Diplomacy: Problems and Challenges. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71121>
- Mansour-Ille, D. (2019). Social Media and the Dynamics of Radicalization and Violent Extremism among Female Migrant Workers. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, 19(3), 248–268. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/sena.12309>

- Mell, S. M. (2019). Females in the Middle East and ISIS . In *The Encyclopedia of Women and Crime* (pp. 1–4). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118929803.ewac0556>
- Muslihatinningsih, F., Sinaga, J. P., & Istiyani, N. (2020). Migrasi Migrasi Internasional Penduduk Pulau Jawa Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 106–115. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i2.100>
- Onitsuka, K., Hidayat, A. R. R. T., & Huang, W. (2018). Challenges for the next level of digital divide in rural Indonesian communities. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 84(2). <https://doi.org/10.1002/isd2.12021>
- Prabaningrum Kusumawati, M., & Khairun Hamrany, A. (2023). The Exploitation of Indonesian Migrant Workers When Abroad. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13342>
- Ragazzi, F. (2017). Countering terrorism and radicalisation: Securitising social policy? *Critical Social Policy*, 37(2), 163–179. <https://doi.org/10.1177/0261018316683472>
- The Financial Action Task Force (FATF). (2018). *Financing of Recruitment for Terrorist Purposes*.
- The Soufan Group. (2015). *FOREIGN FIGHTERS: An Updated Assessment of The Flow of Foreign Fighters into Syria and Iraq*.